

**Deniza Mulia Nita**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[deniza.nita@dpr.go.id](mailto:deniza.nita@dpr.go.id)

**Edmira Rivani**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[edmira.rivani@dpr.go.id](mailto:edmira.rivani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret dan pelaporan SPT Tahunan badan jatuh pada 30 April. Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara Indonesia. Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak yang ambisius, yaitu sebesar Rp2.189,3 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,9% dari proyeksi penerimaan tahun 2024.

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di berbagai sektor yaitu reformasi kebijakan pajak, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, dan digitalisasi sistem perpajakan. Reformasi kebijakan pajak mencakup penyederhanaan tarif pajak agar lebih adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, implementasi pajak karbon sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi sekaligus menciptakan sumber penerimaan baru, serta perbaikan regulasi dan kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital, pemerintah juga berupaya untuk mengatur pajak bagi perusahaan berbasis internet guna memastikan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara.

Di luar pajak, pemerintah juga mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan alternatif. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan pengawasan terhadap sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi agar pembayaran royalti dan pendapatan negara dari sektor ini dapat lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui dividen dan keuntungan usaha. Dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, diharapkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara dapat semakin maksimal.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi, terutama dalam pelaporan pajak di tahun 2025. Digitalisasi sistem perpajakan yang semakin kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta individu yang belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi digital. Meskipun sistem *e-Filing* dan *e-Billing* telah diterapkan, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur pelaporan pajak secara daring. Selain itu, isu keamanan siber juga menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya risiko kebocoran data pribadi dan finansial wajib pajak. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian regulasi perpajakan yang sering mengalami perubahan, sehingga wajib pajak perlu terus memperbarui pemahamannya terhadap kebijakan terbaru. Tidak hanya itu, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar dengan memanfaatkan celah hukum juga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki sistem keamanan siber, serta menyederhanakan regulasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan skema *Automatic Exchange of Information* (AEOI) serta menjalin perjanjian perpajakan bilateral, pemerintah dapat melacak aliran dana wajib pajak yang berada di luar negeri dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas batas. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam perpajakan serta memastikan bahwa seluruh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan, reformasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hingga optimalisasi sumber pendapatan lain seperti PNBPN dan kerja sama internasional dalam perpajakan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan negara dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## Atensi DPR

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, khususnya dalam optimalisasi penerimaan pajak, reformasi sistem perpajakan, serta peningkatan PNBPN. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja dalam pengawasan kebijakan fiskal dan perpajakan nasional. Penyederhanaan tarif pajak dan implementasi pajak karbon merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, seringnya perubahan regulasi perpajakan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Selain itu, perlu pengawasan lebih ketat terhadap PNBPN, terutama dari sektor sumber daya alam dan dividen BUMN, agar kontribusinya terhadap APBN semakin optimal. Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 4 Februari 2025;  
nasional.kontan.co.id, 6 Februari 2025;  
pajak.com, 6 Februari 2025;  
rri.co.id, 5 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Fauzan Lazuardi R.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*